

PENGARUH DANA DESA, INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS, DAN KEMISKINAN TERHADAP PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Daru Tri Rekso Joko Nuryanto, Rino Bagus Haryanto, Muhammad Daffa Heraldly,
Aurora Putri Aprilia, dan Tiara Ayu Nugraheni
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

Village independence as reflected in the value of the Developing Village Index (IDM) can be influenced by several factors, including the Village Fund, Geographical Difficulty Index (IKG), Poverty, and so on. This study aims to examine and analyze the effect of the Village Fund, IKG, and Poverty on Village Independence in North Kalimantan province during the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative research using panel data regression. The results showed that 1) Village Funds had a significant positive effect on village independence, 2) IKG had a significant negative effect on Village independence, 3) Poverty had a significant negative effect on Village independence, and 4) Village Funds, IKG, and Poverty simultaneously had 97,9% significant impact on village independence in North Kalimantan province during the Covid-19 pandemic, while the remaining 2,1% was explained by other factors. It is recommended that the village government can optimize village funds in developing village independence.

Abstrak

Kemandirian desa yang tercermin pada nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis (IKG), Kemiskinan, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa, IKG, dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Utara pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa, 2) IKG berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian desa, 3) Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian desa, dan 4) Dana Desa, IKG, dan Kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Utara pada masa pandemi Covid-19 sebesar 97,9%, sedangkan sisanya sebesar 2,1% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Disarankan agar pemerintah desa dapat mengoptimalkan Dana Desa dalam mengembangkan kemandirian desanya.

Keywords: Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, Kemiskinan, Indeks Desa Membangun

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah menyentuh unit pemerintahan terkecil, yaitu Desa. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahannya di luar pengaruh pemerintah pusat (negara). Desa memiliki peranan penting sebagai titik awal berkembangnya perekonomian di daerah. Pembangunan perdesaan perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang sebelumnya cenderung berorientasi pada wilayah perkotaan (Miraza, 2005).

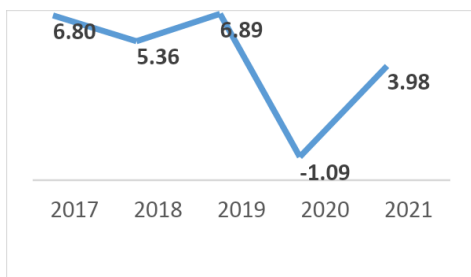
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya memajukan pengembangan perdesaan, diantaranya yaitu kebijakan Dana Desa (DD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PMK Nomor 190 Tahun 2021). Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Adapun klasifikasi belanja desa yang bersumber dari Dana Desa terdiri atas 1) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) pelaksanaan pembangunan desa, 3) pembinaan kemasyarakatan desa, 4) pemberdayaan masyarakat desa, dan 5)

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dana Desa disalurkan dengan maksud sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (UU Nomor 6 Tahun 2014). Kemandirian desa dapat terlihat dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (Permendes PTT Nomor 2 Tahun 2016). IDM disusun dengan maksud mendukung upaya pemerintah dalam menangani desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri, sedangkan tujuannya yaitu menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa (Permendes PTT Nomor 2 Tahun 2016). IDM memiliki faktor kerentanan yang dapat mempengaruhi status desa, yaitu terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial yang berkepanjangan.

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 di Indonesia dan hampir di seluruh dunia telah mengguncang perekonomian, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Grafik pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara dapat terlihat pada Grafik 1.

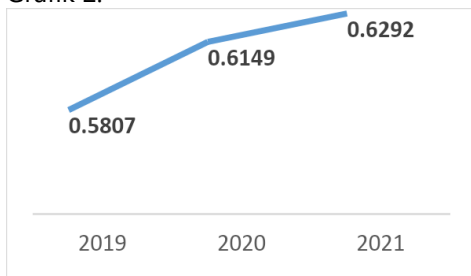


Grafik 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 s.d. 2021 (c-to-c)

Sumber: BPS Provinsi Kaltara, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan data pada Grafik 1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan antara sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019) dan setelah pandemi Covid-19 (tahun 2020) yaitu dari sebesar 6,89% menjadi -1,09%. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perbaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 3,98%.

Namun demikian, pandemi Covid-19 ternyata tidak membuat status desa di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada nilai Grafik 2.



Grafik 2. Nilai IDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 s.d. 2021

Sumber: Kemendes, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan Grafik 2 diketahui bahwa nilai IDM Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan setiap tahun bahkan mengalami kenaikan status, dimana pada tahun 2019 mendapatkan nilai 0,5807 dengan status Tertinggal saat sebelum pandemi Covid-19, naik menjadi 0,6149 dengan status Berkembang pada saat mulai terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020, dan kemudian mengalami kenaikan nilai IDM lagi pada tahun 2021 menjadi 0,6292.

Adapun rincian status desa di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Status Desa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 s.d. 2021

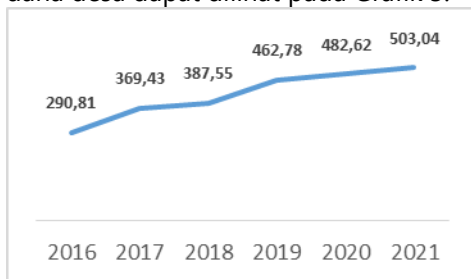
Status Desa	Tahun	
	2020	2021
Sangat Tertinggal	26	6
Tertinggal	208	194
Berkembang	153	169
Maju	41	47
Mandiri	19	31
Total	447	447

Sumber: Kemendes, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa status desa di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 s.d. 2021 mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan paling signifikan terdapat pada status desa Sangat Tertinggal dari sebanyak 26 desa menjadi sebanyak 6 desa atau menurun sebesar 76,92%. Selanjutnya yaitu status desa Mandiri dari sebanyak 19 desa menjadi sebanyak 31 desa atau naik sebesar 63,16%.

Peningkatan nilai IDM yang diiringi dengan kemajuan status desa di Provinsi Kalimantan Utara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya Dana

Desa, Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan Persentase Kemiskinan. Dana Desa menjadi komponen terbesar dari pendapatan desa sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan. Realisasi penyaluran dana desa dapat dilihat pada Grafik 3.



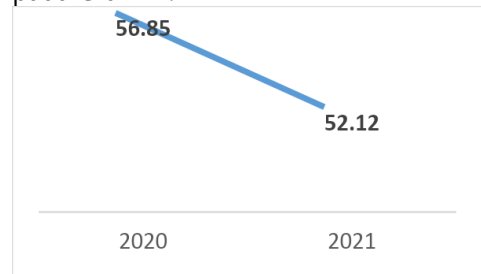
Grafik 3. Realisasi Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Utara Tahun 2016 s.d. 2021 (miliar rupiah)

Sumber: SIMTRADA, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan Grafik 3 diketahui bahwa realisasi penyaluran Dana Desa selalu meningkat setiap tahun, dengan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp503,04 miliar. Hal ini sangat penting mengingat sejak tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19, sehingga dukungan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk Dana Desa yang meningkat sangat membantu dalam menghadapi pandemi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dana Desa turut mempengaruhi status kemandirian desa. Adanya pengaruh Dana Desa terhadap IDM sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Arina (2021) yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap IDM.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan instrumen pengukuran berupa indeks yang disusun berdasarkan penilaian pada setiap

instrumen pendataan potensi desa seperti nilai ketersediaan pelayanan dasar, transportasi, kondisi infrastruktur, dan komunikasi (Kharisma, 2021). IKG memiliki nilai skor 0 s.d. 100 dimana skor mendekati 100 artinya tingkat kesulitan geografis semakin tinggi. Nilai IKG provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Grafik 4.



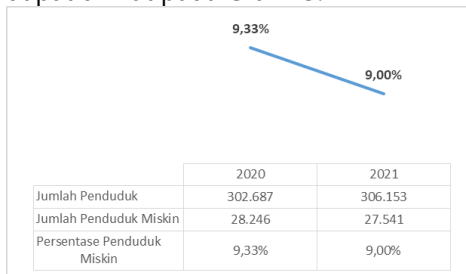
Grafik 4. Nilai IKG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 s.d. 2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Kaltara, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan Grafik 4 diketahui bahwa nilai IKG di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari sebesar 56,85 pada tahun 2020 menjadi 52,12 pada tahun 2021. Semakin rendah nilai IKG menandakan perbaikan dimana pelayanan dasar desa dan sarana transportasi menjadi lebih tersedia serta infrastruktur yang semakin baik. Hal ini dapat mempengaruhi IDM, karena ketersediaan beberapa hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan desa dalam mengembangkan kemandiriannya. Adanya pengaruh IKG terhadap IDM sejalan dengan hasil penelitian Kharisma (2021) yang menunjukkan bahwa IKG berpengaruh negatif terhadap IDM.

Kemiskinan dapat mempengaruhi IDM, karena dapat menjadi permasalahan yang serius dalam menghambat pengembangan kemandirian desa. Semakin tinggi persentase kemiskinan di desa

menandakan semakin banyak jumlah penduduk miskin di desa tersebut, yang artinya semakin banyak penduduk desa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Data persentase kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5. Persentase Kemiskinan Desa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 s.d. 2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Kaltara, 2022 (Diolah penulis)

Berdasarkan Grafik 5 diketahui bahwa persentase kemiskinan desa di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari sebesar 9,33% pada tahun 2020 menjadi sebesar 9% pada tahun 2021. Turunnya persentase kemiskinan tersebut menandakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi nilai IDM dan berdampak pada status kemandirian desa. Adanya pengaruh kemiskinan terhadap IDM sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diba, dkk (2020).

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi IDM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dengan hasil yang beragam. Hasil penelitian Dewi (2018) dan Arina (2021) menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan

terhadap IDM, sedangkan hasil penelitian Arfiansyah (2020) menunjukkan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Begitu pula dengan hasil penelitian pengaruh persentase kemiskinan, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Diba, dkk (2020) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IDM, sedangkan hasil penelitian Fasya (2020) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IDM.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan Kemiskinan terhadap Pengembangan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Utara pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan Kemiskinan terhadap Pengembangan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Utara pada Masa Pandemi Covid-19 secara parsial dan simultan.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian Teori

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usulnya, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Adapun masyarakat di wilayah perdesaan masih menghadapi permasalahan diantaranya kemiskinan

dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi tersebut mendorong perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan negara (APBN) bagi masyarakat desa.

Pemerintah telah mengakui kewenangan desa dengan tujuan untuk memberdayakan desa agar tidak tertinggal dan menjadi desa maju atau mandiri. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola daerahnya sendiri (mandiri) termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat memberikan dampak yang baik seperti meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Abidin, 2015).

Dana Desa

Selaku entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi, desa memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain (Khoiriah & Meylina, 2017). Dana Desa sebagai salah satu pendapatan transfer yang diterima desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Bawono, 2019). Selain itu, Dana Desa juga merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal untuk mewujudkan otonomi desa. Raharjo (2020) menyatakan, sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan kemasyarakatan, dan kemasyarakatan.

Menurut Martini, dkk (2020), belanja desa bidang pembangunan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur desa yang mengutamakan skema padat karya tunai dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan material lokal yang dapat meningkatkan upah/pendapatan masyarakat desa, sehingga dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Pamungkas, dkk, 2020).

Selanjutnya, dalam meminimalisir dampak dari terjadinya bencana, pemerintah telah melakukan upaya mitigasi yang dimulai dari desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil. Upaya pemerintah ini diwujudkan melalui pengalokasian belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (Rahmat dkk, 2015). Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan kebijakan *refocusing* penggunaan Dana Desa untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) (Maun, 2020).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke

waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999).

Adapun pertumbuhan ekonomi dapat terjadi diakibatkan oleh munculnya perubahan yang fundamental pada aktivitas perekonomian maupun kondisi politik dan sosial suatu masyarakat. Selain itu, proses pembangunan ekonomi dibedakan menjadi 5 tahapan, yakni: a. Masyarakat Tradisional, dimana fungsi produksi masyarakat terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif primitif berdasar ilmu dan teknologi pra-Newton serta cara bertahan hidup dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional dan hal tersebut menjadi kebiasaan turun menurun; b. prasyarat lepas landas, dimana masyarakat sudah mulai mempersiapkan dirinya guna mencapai pertumbuhan dengan kekuatannya; c. lepas landas, terjadi perubahan cukup drastis dalam masyarakat seperti adanya inovasi ataupun teknologi; d. tahap menuju kedewasaan, dimana masyarakat sudah menggunakan teknologi secara efektif pada kegiatan produksi; e. tahap konsumsi tinggi, perhatian masyarakat sudah bergeser kepada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat yang dulunya fokus terhadap masalah produksi (Rostow, 2008).

Indeks Kesulitan Geografis

Adinugroho, dkk (2016) menyatakan, keragaman karakteristik geografis Indonesia merupakan sebuah tantangan besar dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan di tiap daerah. Indeks Kesulitan Geografis merupakan indeks yang mengukur kesulitan geografis

suatu desa berdasarkan hasil integrasi nilai ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi (Kharisma, 2021).

Lewis (2015) mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal desa melalui Dana Desa dapat meningkatkan peluang pembangunan desa yang lebih baik, sebaliknya peningkatan satu persen populasi desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan jumlah penduduk miskin akan berdampak kepada potensi pembangunan desa yang menurun. Indeks Kesulitan Geografis memiliki nilai dari 0 sampai dengan 100 dimana nilai skor yang semakin mendekati angka 100 menandakan semakin tinggi tingkat kesulitan geografisnya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi (Atalay, 2015).

Dalam penghitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sebuah konsep kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dikenal dengan "*basic need approach*". "Kebutuhan dasar" mengacu pada persyaratan mendasar pemenuhan kebutuhan hidup layak minimum, yaitu pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Dengan pendekatan ini, pengukuran kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum yang didasarkan pada sejumlah komoditas makanan (*food basket*) minimal untuk memenuhi kebutuhan kalori, ditambah sejumlah pengeluaran bukan makanan (*non-food basket*).

Ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum juga merupakan suatu pendekatan secara moneter atau garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum dalam rupiah (*monetary approach*). Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan. Status miskin adalah yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). *Indeks Desa Membangun (IDM.)*

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dengan menggunakan Indikator Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Muhtarom, dkk, 2018). IDM

mengklasifikasikan status desa ke dalam 5 status kemajuan dan kemandirian desa, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal (Sriningsih, dkk, 2020). Penggunaan Indikator IDM akan memudahkan untuk melakukan penyusunan intervensi pembangunan, mencakup aspek infrastruktur, kelembagaan, dan lingkungan, pengisian data sederhana sehingga mudah dipraktekkan (Sukiyono, dkk, 2019). Selain itu, Irmayani, dkk (2021) menyatakan IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa, yaitu tipologi dan modal sosial.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu bermaksud untuk mendapatkan bahan perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Adapun hasil-hasil

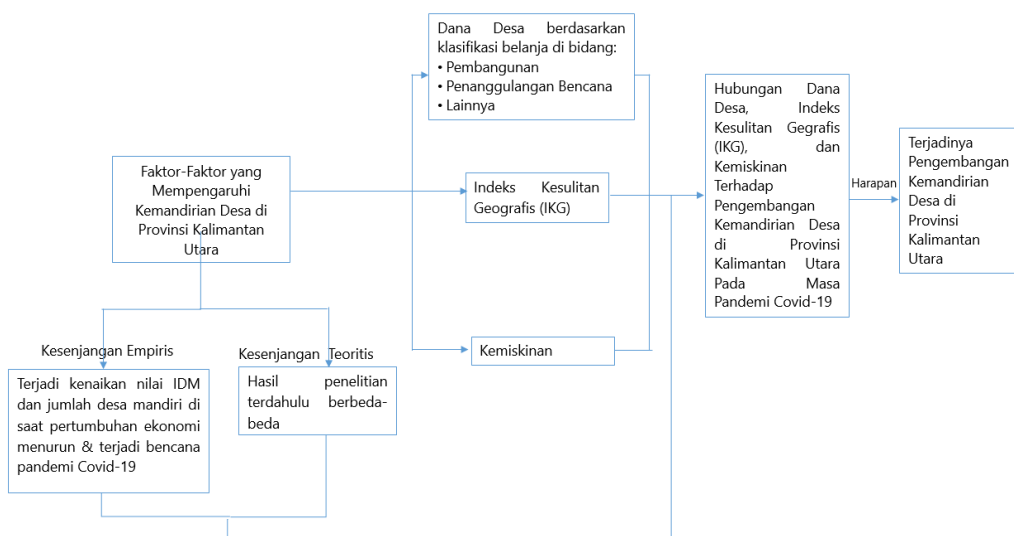
penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Arina (2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun sebesar 74,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Kharisma (2021) yang menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki korelasi negatif terhadap kenaikan IDM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diba, dkk (2020) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap IPM dengan elastisitas negatif sebesar 0,046. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Fasya (2020) yang menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki korelasi negatif namun tidak signifikan terhadap IDM.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disusun kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan Kemiskinan Terhadap Kemandirian Desa di provinsi Kalimantan Utara seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Hubungan Dana Desa terhadap Kemandirian Desa

Secara umum, kemandirian desa dalam pembangunan dimaknai sebagai desa yang memiliki kemampuan dan kualitas dalam menyelenggarakan pemerintahannya (Purwasih & Astuti, 2021). Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan transfer yang diterima desa, diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa dan mendukung kemandirian desa. Dengan dialokasikannya Dana Desa, pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat meningkatkan nilai komposisi yang digunakan dalam penghitungan indikator kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, dkk (2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil hipotesis 1 yaitu:

Hipotesis 1: Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa di provinsi Kalimantan Utara.

2. Hubungan Indeks Kesulitan Geografis terhadap Kemandirian Desa

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan instrumen pengukuran berupa indeks yang disusun berdasarkan penilaian pada setiap instrumen pendataan potensi desa seperti nilai ketersediaan pelayanan dasar, transportasi, infrastruktur,

dan komunikasi (Kharisma, 2021). Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin rendah kondisi pelayanan dasar, infrastruktur, dan aksesibilitas transportasi ke wilayah tersebut. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tingginya nilai IKG merupakan faktor penghambat pembangunan desa dan penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi indikator kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinugroho, dkk (2016), dan Kharisma (2021). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil hipotesis 2 yaitu:

Hipotesis 2: IKG berpengaruh terhadap kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Hubungan Kemiskinan terhadap Kemandirian Desa

Salah satu tujuan dari pengalokasian Dana Desa adalah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa (Arfiansyah, 2020). Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kemiskinan di desa dapat diatasi. Sebaliknya, semakin tinggi persentase kemiskinan di desa menandakan semakin banyak jumlah penduduk miskin di desa tersebut, yang artinya semakin banyak penduduk desa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Tidak terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pendidikan ini tentunya dapat memengaruhi Indeks Ketahanan

Sosial, yang menjadi komponen dalam pengukuran kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Arfiansyah (2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil hipotesis 3 yaitu:

Hipotesis 3: Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa di Kalimantan Utara.

4. Hubungan Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan Kemiskinan terhadap Kemandirian Desa

Dialokasikannya Dana Desa dapat meningkatkan peluang pembangunan desa yang lebih baik, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi ke wilayah tersebut sehingga berdampak terhadap turunnya IKG. Pembangunan desa yang mengutamakan padat karya tunai juga dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan material lokal yang dapat meningkatkan upah/pendapatan masyarakat desa, sehingga dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Pamungkas, dkk, 2020). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kemiskinan desa dapat dientaskan. Dengan demikian, Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang digunakan dalam perhitungan

kemandirian desa akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil hipotesis 4 yaitu:

Hipotesis 4: Dana Desa, Indeks Kesulitan Geografis, dan Kemiskinan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif yang diolah menggunakan regresi linear data panel. Sejalan dengan tujuannya, studi ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Dana Desa, geografis serta kemiskinan terhadap kemandirian desa, serta mampu mengeksplorasi fenomena-fenomena terkait hubungan ini. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkompilasi data sekunder dari instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Perdesaan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Data dan Definisi Variabel

Objek penelitian yang digunakan meliputi 415 dari 446 Desa yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan periode waktu mulai tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertimbangan utama dalam pemilihan periode ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Dana Desa salah satunya dalam bentuk BLT sebagai *shock absorption* bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

IDM = Indeks Desa Membangun, menunjukkan status kemajuan dan kemandirian Desa

MISKIN = Kemiskinan, diukur dengan persentase penduduk miskin per desa

PEMBANGUNAN = Penyerapan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

BENCANA = Penyerapan Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

LAIN = Penyerapan Dana Desa Bidang Pembiayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$IDM = \alpha + \beta_1 IKGit + \beta_2 MISKINit + \beta_3 PEMBANGUNANit + \beta_4 BENCANAit + \beta_5 LAINit$$

Transformasi data dalam bentuk logaritma natural ke dalam model dilakukan untuk mengatasi hubungan tidak linier antara variabel bebas (*independen*) dengan variabel terikat (*dependen*) serta membuat data berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal.

Model awal berubah menjadi model Lin-Log sebagai berikut:

$$IDM = \alpha + \beta_1 LN_IKGit + \beta_2 LN_MISKINit + \beta_3 LN_PEMBANGUNANit + \beta_4 LN_BENCANAit + \beta_5 LN_LAINit + \epsilon it$$

dimana:

IDM = Indeks Desa Membangun

MISKIN = Persentase Kemiskinan

PEMBANGUNAN = DD Bidang Pembangunan

BENCANA = DD Bidang Penanggulangan Bencana

LAIN = DD Bidang Lainnya

α = konstanta

β = koefisien

e = *error*

it = data kabupaten/tahun

Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis menggunakan regresi data panel. Untuk mendapatkan model estimasi terbaik maka dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman diketahui bahwa metode terbaik untuk mengestimasi model penelitian ini adalah dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM).

Setelah ditemukan metode yang tepat, dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik lainnya tidak diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati, 2012). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam sampel data yang besar, asumsi normalitas mungkin tidak terlalu krusial. Selain itu autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*, sedangkan data panel cenderung memiliki sifat data *cross section*.

Berdasarkan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas maupun masalah multikolinearitas. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara simultan, uji koefisien regresi (R^2), dan uji t untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemilihan Model Regresi

a. F Test (Chow Test)

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Chow test* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Tabel 2

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	19.116826	(414,410)	0.0000
Cross-section Chi-square	2498.951560	414	0.0000

Sumber: Hasil Regresi Data Panel dengan e-views

Terlihat nilai Prob. $< \alpha$ yaitu sebesar 0,000 $< 0,05$, maka dapat disimpulkan berdasarkan *Chow Test*, model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan model *Common Effect*.

b. Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hipotesis yang

dibentuk dalam *Hausman test* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Tabel 3

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	257.201582	5	0.0000

Sumber: Hasil Regresi Data Panel dengan e-views

Terlihat nilai Prob. $< \alpha$ yaitu sebesar 0,0000 $< 0,05$, maka dapat disimpulkan berdasarkan Hausman Test, model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan model *Random Effect*. Dari hasil kedua uji diatas, maka model terbaik dipilih adalah model *fixed effect*.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	LN_IKG	LN_MISKIN	LN_PEMBANG UNAN	LN_BENCANA	LN_LAIN
LN_IKG	1.000000	0.398940	-0.040264	-0.200105	0.044875
LN_MISKIN	0.398940	1.000000	0.024894	-0.073235	0.123743
LN_PEMBANGUNAN	-0.040264	0.024894	1.000000	0.113992	0.595497
LN_BENCANA	-0.200105	-0.073235	0.113992	1.000000	0.104204
LN_LAIN	0.044875	0.123743	0.595497	0.104204	1.000000

Sumber: Hasil Regresi data panel dengan e-views

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai korelasi antar variabel independen.

Hipotesis yang dibentuk dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak terjadi masalah multikolinearitas

H₁: Terjadi masalah multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013) dasar dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai korelasi > 0,80 maka H₀ ditolak, sehingga terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai korelasi < 0,80 maka H₀ diterima, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80, maka H₀ diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis.

- a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Hipotesis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengujian ini adalah:

H₀: Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H₁: Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 5
Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: IDM
Method: Panel Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.593064	0.041788	14.19229	0.0000
LN_IKG	-0.008307	0.009217	-0.901281	0.3680
LN_MISKIN	-0.013656	0.005830	-2.342217	0.0196
LN_PEMBANGUNAN	0.000560	0.000259	2.159497	0.0314
LN_BENCANA	0.000704	0.000218	3.234373	0.0013
LN_LAIN	0.000404	0.000243	1.659399	0.0978

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.979754	Mean dependent var	0.622460
Adjusted R-squared	0.959063	S.D. dependent var	0.094741
S.E. of regression	0.019169	Akaike info criterion	-4.764279
Sum squared resid	0.150653	Schwarz criterion	-2.375124
Log likelihood	2397.176	Hannan-Quinn criter.	-3.848071
F-statistic	47.35267	Durbin-Watson stat	3.990385
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Regresi data panel dengan e-views

Penentuan simpulan uji F dilihat berdasarkan nilai probabilitas F dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Apabila nilai probabilitas *F-statistic* yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil regresi, nilai $\text{Prob}>F$ diperoleh nilai 0,0000 atau lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Dari hasil uji signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Kesulitan Geografis, Persentase Penduduk Miskin, Dana Desa Bidang Pembangunan Penyerapan Dana Desa Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, serta Bidang Pembiayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kemandirian Desa.

b. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Koefisien determinasi menggambarkan seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya (*goodness of fit*). Apabila nilainya mendekati 1, maka garis regresi semakin baik

karena mampu menjelaskan data aktualnya.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0.979754. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 97,97% kemandirian desa dipengaruhi oleh variasi dari kelima variabel independen yang digunakan, yaitu Dana Desa, Persentase Penduduk Miskin serta Kesulitan Geografis. Sedangkan sisanya sebesar 12,03% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini dengan taraf signifikansi 5% adalah persentase penduduk miskin, penyerapan Dana Desa bidang pembangunan dan penanggulangan bencana. Sedangkan untuk variabel penyerapan Dana Desa bidang lainnya mempunyai signifikansi pada 10%. Namun indeks kesulitan geografis tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian desa.

d. Analisis Hasil Regresi

Dari hasil regresi data panel, dapat ditampilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{IDM} = 0.593064 - 0.008307 \text{ IKGit} - 0.013656 \text{ MISKINit} + 0.000560 \text{ PEMBANGUNANit} + 0.000704 \text{ BENCANAit} + 0.000404 \text{ LAINit} + \epsilon_{it}$$

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemandirian Desa

Belanja yang bersumber dari Dana Desa diklasifikasikan ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan, penanggulangan bencana, dan lainnya (pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, dan pembiayaan). Permasalahan utama di desa salah satunya adalah masih minimnya infrastruktur dalam upaya menggerakkan perekonomian desa, baik infrastruktur berupa jaringan fisik seperti jalan maupun infrastruktur non-fisik seperti pasokan listrik atau kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan mempunyai dampak positif dan signifikan bagi peningkatan kemandirian desa. Pembangunan desa memiliki pengaruh terhadap positif dan signifikan dalam mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di desa (Farida, dkk, 2020) melalui keterbukaan isolasi desa dan akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi lokal (Utomo, 2019) yang dapat dilihat dari peningkatan kemandirian masyarakat desa (Firmansyah, dkk, 2020). Selain itu, dampak sosial dari kurangnya pembangunan desa akan meningkatkan terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota.

Namun temuan ini berbeda dengan hasil temuan dari Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengalokasian dana desa untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Perbedaan temuan ini dapat dijelaskan dalam konsep kewilayahan. Umumnya kondisi

desa di wilayah Jawa sudah lebih baik dari segi infrastruktur, sehingga yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi desa. Sehingga pembangunan sarana prasarana justru bukan menjadi sasaran utama, namun sasaran utamanya adalah pemberdayaan dan pembinaan.

Di sebagian besar wilayah desa di Kalimantan Utara, kondisi infrastruktur desa masih sangat tertinggal. Hal ini pula yang menjadi dasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) prioritas pembangunan di Kalimantan Utara.

Oleh karenanya, pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan khususnya pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana desa di wilayah Kalimantan Utara mutlak sangat diperlukan. Sebagai contoh untuk sarana jalan, BPS Provinsi Kalimantan Utara (2021) mencatat baru sekitar 56% desa yang jalan utamanya sudah diperkeras dengan aspal atau beton, sisanya masih berupa jalan kerikil dan tanah. Kurangnya sarana dan infrastruktur di pedesaan wilayah Kalimantan Utara mendorong tingginya biaya dalam aktivitas perekonomian di perdesaan. Tingginya biaya ekonomi tentunya akan berpengaruh pada pengembangan kemandirian desa. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas berbeda dengan desa lainnya, demikian juga terkait aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu pembangunan di desa seharusnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri (Widjaja, 2005).

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengharuskan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif demi mendukung pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan, terlihat bahwa penggunaan Dana Desa di bidang penanggulangan bencana mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian desa. Sofi (2021) menyatakan, efektivitas pelaksanaan BLT Desa dapat diperoleh dengan hasil pembagian antara *outcome* pelaksanaan, dalam hal ini penilaian publik terhadap kebijakan BLT Desa serta output yang menunjukkan realisasi penyaluran BLT Desa sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan BLT Desa tahun 2020 sangat efektif karena nilainya diatas 80 persen.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki disparitas yang tinggi antara kemiskinan pada perdesaan dengan kemiskinan di perkotaan dimana besarnya masing masing 9,31% dan 5,32% hingga Bulan September 2021. Komoditas makanan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara dengan kontribusi sebesar 72,75%. Dari hasil uji regresi yang telah dilakukan, penggunaan Dana Desa di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2020 dan 2021 dimana realisasinya

didominasi oleh penyaluran BLT Desa terbukti efektif sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di desa. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat miskin di desa berimplikasi langsung terhadap kemandirian suatu desa, dimana salah satu indikator pembentuk Indeks Desa Membangun adalah Indikator Ketahanan Sosial yang memperhitungkan tingkat kesejahteraan sosial di desa.

Yuliadi dan Sumitro (2021) berpendapat bahwa penyaluran BLT Desa yang berkepanjangan akan mengkonstruksi masyarakat dalam bingkai kemiskinan, dimana masyarakat miskin yang awalnya merupakan identifikasi sementara akibat kondisi pandemi, berubah menjadi identifikasi permanen dimana masyarakat penerima BLT melabeli diri sebagai masyarakat miskin. Azhari dan Suhartini (2021), berpendapat edukasi dan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat sangatlah penting agar penggunaan BLT Desa bukan diarahkan pada pengeluaran yang sifatnya konsumtif yang dampaknya hanya bersifat sementara.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan mempunyai dampak positif dan signifikan dalam mengembangkan kemandirian desa.

Pemberdayaan merupakan upaya membangun kesadaran akan potensi ekonomi (Zubaedi, 2007). Tujuan akhirnya nantinya adalah untuk menuju kemandirian. Upaya-upaya untuk

mewujudkan kemandirian melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berupa peningkatan akses bantuan modal usaha; pengembangan SDM; dan sarana prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal (Sumodiningrat, 1999).

Dalam konteks pembinaan, Dana Desa di wilayah Kalimantan Utara perlu juga digunakan untuk pembentukan kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Dikaitkan lebih jauh, pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses pembentukan kelembagaan (*institution building*) (Blakely, 1994). Kelembagaan di desa inilah yang nantinya berfungsi dalam memobilisasi semua potensi baik yang berasal dari dalam maupun luar desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan kelembagaan akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan SDM yang ada di desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas SDM di wilayah perdesaan merupakan yang paling rendah apabila dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Kurangnya pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial lainnya juga menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM ini tentunya juga akan mempengaruhi pencapaian potensi desa dalam mencapai kemandirian, ini dikarenakan sumber daya manusia memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja baik itu di bidang ekonomi maupun pemerintahan desa.

Salah satu problematika masyarakat perdesaan dalam upaya pengembangan ekonomi dan kemandirian adalah

sulitnya akses masyarakat desa ke lembaga keuangan dan perbankan. Selain keterbatasan akses sarana, *asymmetric information* juga menjadi kendala. Dari sisi ini seharusnya Dana Desa bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Dengan adanya pembiayaan yang memadai serta mudah, masyarakat desa dapat mengembangkan perekonomiannya untuk menuju kemandirian desa.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Arina (2021) yang menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap IDM

Pengaruh Kesulitan Geografis Terhadap Kemandirian Desa

Salah satu modal alamiah bagi desa dalam memenuhi tingkat kemakmuran dan kemajuan penduduknya adalah faktor geografis.

Dari Tabel 5 hasil uji regresi, dapat dilihat bahwa Indeks Kesulitan Geografis berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kemandirian desa. Indeks Kesulitan Geografis mempunyai dampak berbanding terbalik dengan Kemandirian desa (Kharisma, 2021). Desa-desa yang memiliki kesulitan geografis yang rendah mempunyai tingkat pembangunan desa dan kemandirian yang relatif lebih tinggi dibanding desa sekitarnya (Adinugroho, dkk, 2016).

Ciri khas topografi sebagian besar daerah di Kalimantan Utara adalah berupa sungai dan daratan yang berupa bukit dan lembah. Kondisi ini membuat akses yang menghubungkan antar wilayah desa relatif sulit, terlebih jarak

antar wilayah desa yang relatif jauh dan tersebar.

Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa sektor transportasi memiliki peran krusial sebagai urat nadi dalam menunjang kehidupan serta perekonomian masyarakat suatu daerah untuk membentuk kemandirian desa. Konektivitas antar desa serta desa-kota merupakan salah satu kunci dalam pengembangan logistik baik itu yang terkait dengan produksi barang/jasa maupun distribusi barang-barang konsumsi. Putnam (1993), menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi pedesaan (*village economy*) dalam sebuah sinergi antara satu kegiatan ekonomi di suatu desa dengan desa yang lainnya telah membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara Cina.

Belum memadainya sarana transportasi darat berupa jalan yang layak membuat sarana transportasi yang paling efektif dalam menghubungkan daerah di Kalimantan Utara adalah angkutan sungai. Rendahnya pengaruh Indeks Kesulitan Geografis di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa tingginya kesulitan geografis dalam skala tertentu masih bisa diatasi melalui alternatif jalur sungai yang umum digunakan oleh masyarakat.

Tabel 6
Kondisi Indeks Kesulitan Geografis
Kalimantan Utara 2020-2021

Kabupaten	Tertinggi	Terendah	Rata ²
Nunukan	92,78	19,77	60,92
Malinau	93,01	15,97	52,21
Tana Tidung	71,69	9,62	45,53
Bulungan	74,11	13,94	41,51

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata desa yang memiliki IKG tinggi ada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Hal ini dikarenakan di kedua kabupaten tersebut banyak desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Fenomena ini jamak terjadi di daerah perbatasan dimana ketersediaan infrastruktur untuk konektivitas yang masih tertinggal dibanding wilayah lainnya dikarenakan faktor geografis yang sulit dijangkau. Faktor kesulitan geografis akan meningkatkan biaya proyek infrastruktur di wilayah perdesaan (Geni, dkk, 2020).

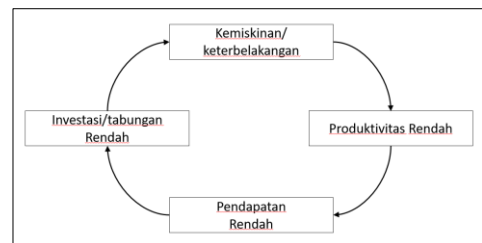
Kesulitan geografis ini juga yang membuat arus ekonomi di perdesaan di wilayah Kalimantan Utara tidak dapat berjalan. BPS Kalimantan Utara (2020) mencatat bahwa sekitar 207 desa di Nunukan, 82 desa di Malinau, 58 desa di Bulungan dan 28 Desa di Tana Tidung tidak mempunyai pertokoan dan pasar.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa IKG berpengaruh terhadap kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan teori Lewis (2015) dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kharisma (2021) yang menunjukkan bahwa IKG berpengaruh negatif terhadap IDM.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kemandirian Desa

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji regresi dapat dilihat bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian desa dengan koefisien -0.013656. Kemiskinan yang berpengaruh negatif berarti semakin rendah kemiskinan semakin tinggi kemandirian, demikian juga sebaliknya. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah;
3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.



Gambar 2. *Vicious Circle of Poverty Trap*

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse (Kuncoro, 2000) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Di Kalimantan Utara, kemiskinan di perdesaan menjadi isu yang penting. Dari data DPMD, masih banyak desa-desa yang jumlah kemiskinan penduduknya sangat tinggi. Sejalan

dengan teori *vicious circle of poverty*, maka kemiskinan di desa hanya akan melahirkan generasi miskin lainnya. Untuk itu, dalam rangka pencapaian kemandirian desa, hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan. Itu berarti upaya pencapaian kemandirian desa perlu dibarengi juga dengan upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diba, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IDM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam peningkatan kemandirian desa di Kalimantan Utara, peran Dana Desa sangat penting dan krusial. Hal ini tidak lepas dari masih tingginya ketimpangan sarana dan prasarana dasar di desa, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Ditambah lagi sebagian wilayah perdesaan merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga yang hampir tidak tersentuh pelayanan dasarnya. Aksesibilitas dan juga konektivitas antar wilayah desa diperlukan dalam rangka menciptakan jalur logistik ekonomi, kesehatan dan sosial.

Sebagai wilayah yang baru terbentuk, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Membangun Indonesia dari wilayah perbatasan bukan hanya mendirikan bangunan megah di Pos Lintas Batas Negara, namun lebih dari itu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat juga penting untuk dilaksanakan.

Yang tidak kalah penting dalam penggunaan Dana Desa sebagai *booster* kemandirian desa adalah menentukan skala prioritas penggunaan Dana Desa yang tepat. Dana Desa hendaknya digunakan untuk mendukung konektivitas antar desa serta perekonomian yang berkelanjutan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dari hasil penelitian ini, perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan baik itu di pusat maupun di daerah terkait kebijakan penggunaan Dana Desa di masing-masing wilayah. Dengan keunikan dan karakteristik desa, wilayah, topografi dan geografi bisa menjadi acuan pemerintah terkait kebijakan penyaluran Dana Desa.

Eliminasi data dilakukan karena beberapa desa tidak tersedia datanya. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah data yang dapat diolah. Selain itu masih dimungkinkan adanya variabel yang memengaruhi kemandirian desa di luar model. Penelitian ini mengambil data pada saat masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 dan 2021, sehingga hasil penelitian ini tidak menggambarkan kondisi sebelum terjadi pandemi Covid-19. Peneliti selanjutnya bisa memasukkan variabel *dummy* untuk mengetahui dampak Dana Desa sebelum dan pada saat terjadinya pandemi Covid-19.

REFERENSI

Abidin, M. Z. 2015. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*

(Study Of Implementation Of Village Finance To Support Fund Village Policy).

- Adinugroho, G., dkk. 2016. *Pola Spasial Indeks Kesulitan Geografis dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Kabupaten Gunungkidul*. Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 5(2), 158-170.
- Arfiansyah, M. A. 2020. *Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah*. Jurnal Lisyabab, 1(1), 91-106.
- Amalia, A. D., & Syawie, M. 2015. *The Development of Rural Resilience With Empowering Concept : a. Sosio Informa*, 1(2), 175-188.
- Arina, A. I. S., dkk. 2021. *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 22(3), 22-41.
- Azhari, A. & Suhartini, D. 2021. *Efektivitas Dana Desa untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Proaksi, 8(2), 354-362.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. 2021. *Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Utara 2020*. In Badan Pusat Statistik. https://lppm.akprind.ac.id/media/2019_26072017_Materi_01-Profil_Potorono-Prawata
- Badan Pusat Statistik 2021. *Tingkat Kemiskinan Kalimantan Utara September 2021*. Berita Resmi Statistik No. 05/01/65/Th.VII, 17 Januari 2022.
- Bawono, I. R. & Setyadi, E. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Blakely, J. and Bade, D. H. 1994. *Ilmu Peternakan Cetakan ke-4*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Dewi, R. S. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4 (2) November 2018. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- Diba, A. F. O., Fathorrazi, M., & Somaji, R. P. (2020). *Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur*. Jurnal Ekuilibrium, 2(1), 10-19.
- Farida, F., dkk. 2020. *Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri*. Ikraith-Abdimas, 4(1), 65-73.
- Fasya, M. N. 2020. *Hubungan Kemiskinan dan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Firmansyah, D., dkk. 2020. Abstrak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2), 168-181.
- Geni, P. 2020. *Demografi Pengumpulan Data Faktor Karakteristik Demografi dan Biaya Proyek*. 3(1), 215-222.
- Gujarati, Damoda N. (2004). *Basic Econometrics*, Fourth Edition, Singapore. McGraw-Hill Inc.
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. 2014. *Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan*

- Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011–2014.* Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 2(3).
- Irmayani, N. R. dkk. 2021. *Kebijakan Desa Berketahanan Sosial.* Puslitbangkesos & P3KS Press.
- Kharisma, B. 2021. *Dampak Anggaran, Kesulitan Geografis, dan Rumah Tangga Desa terhadap Status Desa di Provinsi Riau.* Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, 5 (3): 187 – 202.
- Khoiriah, S. & Meylina, U. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa.* Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 20-29.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan.* Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Maun, C. E. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.* Jurnal Politico, 9(2).
- Miraza, B. H. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.* Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Muhtarom dkk. 2018. *Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.* Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan, 6(2).
- Pamungkas, B. D., dkk. 2020. *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa.* Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 96-108.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Purwasih, A. R., & Astuti, R. S. 2021. *Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora.* Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 24(1), 41-58.
- Putnam, R. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life.* American Prospect. Spring.
- Raharjo, M. M. 2020. *Pengelolaan Dana Desa.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, D. (2017). *Economics Development Analysis Journal Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.* Economics Development Analysis Journal, 6(2), 107–116.
- Rahmat, N. 2015. *Kajian Distribusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Terhadap Program Kebencanaan.* Jurnal Ilmu Kebencanaan: Program Pascasarjana Unsyiah, 2(3).

- Rostow, W. 2008. *The Stages of Economic Growth. The Economic History Review*, 1 (16).
- Sinaga, I. (2017). *Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Membantu Mewujudkan Kemandirian Desa: Studi Kasus di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 1(2), 84-100.
- Sofi, I. 2021. *Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, 6(3), 247-262.
- Sukiyono, K. dkk. 2019. *Jejak Indeks Desa Membangun 2015-2019*. PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sumodiningrat, G. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia
- Tambunan, B. H., dkk. (2020). *Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*. Perspektif, 9(2), 439-446.
- Utomo, B. T. 2019. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai*. Urban and Regional Studies Journal, 1(2), 50-57.
- Widjaja, H. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada
- Yuliadi, I. & Sumitro. 2021. *Efektivitas BLT Covid-19 di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa (Studi Konstruksi Sosial Kemiskinan)*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 9(3).
- Yusuf, S. P. M. (2015). *Implementasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Di Desa Boboh Kecamatan Menganti)*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 12(1), 137-150.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik (1st ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.